



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati / Walikota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sehubungan dengan itu akan dilaksanakan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024, untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi Pengukuran IPKD Kab/Kota Tahun Anggaran 2023 yaitu :

NO	KAB/KOTA	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI/KET
1	Morowali	81,056	Baik	A
2	Toli-Toli	79,903	Perlu Perbaikan	B
3	Sigi	78,586	Perlu Perbaikan	B
4	Tojo Una-una	77,587	Perlu Perbaikan	B
5	Banggai Laut	75,179	Perlu Perbaikan	B
6	Banggai	70,504	Perlu Perbaikan	B
7	Kota Palu	70,224	Perlu Perbaikan	B
8	Buol	69,458	Perlu Perbaikan	B
9	Poso	68,747	Perlu Perbaikan	B
10	Morowali Utara	67,937	Perlu Perbaikan	B
11	Parigi Moutong	63,978	Sangat Perlu Perbaikan	C
12	Banggai Kepulauan	63,625	Sangat Perlu Perbaikan	C
13	Donggala	56,605	Sangat Perlu Perbaikan	C

2. Kabupaten/Kota membentuk Tim Koordinasi IPKD Kab/Kota Tahun 2023 yang terdiri dari:
 - 1) BRIDA/BALITBANGDA Kab/Kota;
 - 2) BAPPEDA Kab/Kota;
 - 3) BPKAD Kab/Kota; dan
 - 4) DISKOMINFO Kab/Kota.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) Menyiapkan Data Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) berdasarkan indikator dari 6 Dimensi yaitu:
 - 1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
 - 3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) Penyerapan anggaran;
 - 5) Kondisi Keuangan Daerah; dan
 - 6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

(Indikator masing-masing Dimensi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Mei 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kab/Kota se-Sulawesi Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;
4. Kepala BRIDA/BALITBANGDA Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

Lampiran
Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor : 18 TAHUN 2025
Tanggal : 16 Mei 2025

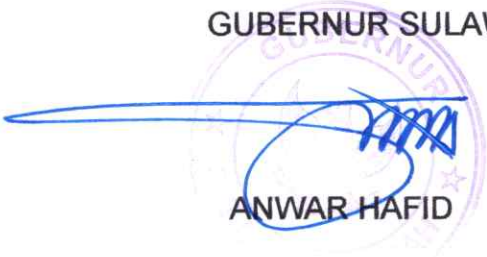
INDIKATOR MASING-MASING DIMENSI

NO	U R A I A N	PD
1.	DIMENSI 1	
	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran <ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD- Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS- Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD- Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS- Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD	BAPPEDA BPKAD
2.	DIMENSI 2	
	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD <ul style="list-style-type: none">1. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%2. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji3. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer4. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BPKAD
3.	DIMENSI 3	
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none">- Ketepatan waktu Merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan.- Keteraksesan Merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya 2 Tahun Anggaran Jenis Data yang Dibutuhkan : <ul style="list-style-type: none">1. Informasi Ringkasan Dokumen RKPD2. Informasi Kebijakan Umum Anggaran3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran4. Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD5. Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD6. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD7. Informasi Peraturan Daerah tentang APBD8. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD9. Informasi Ringkasan DPA SKPD10. Informasi DPA PPKD11. Informasi Realisasi Pendapatan Daerah12. Informasi Realisasi Belanja Daerah	BPKAD Diskominfo

	13. Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah 14. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD 15. Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 16. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 17. Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD 18. Informasi Rencana Umum Pengadaan 19. Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 20. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi 21. Informasi Laporan Arus Kas 22. Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD 23. Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD 24. Informasi Neraca 25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 26. Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah 27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah 28. Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 29. Informasi Opini BPK RI	
4.	DIMENSI 4	
	Penyerapan Anggaran 1. Anggaran Belanja Operasional 2. Anggaran Belanja Modal 3. Anggaran Belanja Tidak Terduga 4. Anggaran Belanja Transfer	BPKAD
5.	DIMENSI 5	
	Kondisi Keuangan Daerah a. Kemandirian Keuangan - Total PAD - Total Pendapatan b. Fleksibilitas Keuangan - Total Pendapatan - DAK - Total Kewajiban - Belanja Pegawai c. Solvabilitas Operasional - Total Pendapatan LO - Pendapatan DAK LO - Total Beban LO d. Solvabilitas Jangka Pendek - Kas dan Setara Kas - Investasi Jangka Pendek - Kewajiban Lancar e. Solvabilitas Jangka Panjang - Total Asset tetap - Kewajiban Jangka Panjang f. Solvabilitas Layanan - Total Asset tetap - Jumlah Penduduk	BPKAD

6.	DIMENSI 6	
	<div>Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD</div> <div>- Pengukuran dilakukan terhadap hasil opini BPK terhadap LKPD selama 3 tahun berturut-turut.</div>	BPKAD

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID